

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR  
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI DI  
KOTA MAKASSAR**

**SKRIPSI**

**OLEH  
NURHIKMAH SYAM  
NIM 105710227615**



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2019**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR  
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI DI  
KOTA MAKASSAR**

**NURHIKMAH SYAM  
105710227615**

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi*

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR 2019**

## MOTTO

**“Tidak Penting Seberapa Lambat Anda Melaju, Selagi Anda Tidak Berhenti”**

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk:

1. kedua orang tuaku kepada ayah syaharuddin dan ibu mihrwati s.pd yang telah tulus dan ikhlas membesarkan, membiayai serta mendoakan setelah aku menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Senyumdan Terharu Kalian Menjadi Tujuan Hidupku Semoga Allah memuliakan kalian berdua.
2. Adikku Fikar Fausan yang turut membantudan mendoakan dan selalunya memberikan semangat
3. Teman – teman seperjuangan yang tak henti – hentinya memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini khususnyakawan – kawan ekonomipembangunan kelas 5 angkatan 2015
4. Keluargadan sepupukutercinta yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat yang tak henti – hentinya memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Ibu Pimpinan Fakultas Ekonomi Pembangunan, Bapak Ibu dosen dan segenap tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmunya
6. Almamater tercinta tempat sayamenimba ilmu yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra LL.7 Tlp (0411) 866972 Makassar

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar.

Nama Mahasiswa : Nurhikmah Syam

No. Stambuk/NIM : 105710227619

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia

Penguji Skripsi Stars Satu (S1) pada Hari Senin 30 September 2019

Makassar, 30 September 2019

Menyetujui

Pembimbing I

Hj. Naldah, SE., M. Si  
NBM. 710 561

Pembimbing II

A. Nur Achsanuddin UA, SE., M. Si  
NIMN. 0920098604

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi EP

Hj. Naldah, SE., M. Si  
NBM. 710 561

Hj. Naldah, SE., M. Si  
NBM. 710561



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin No.289 Gellung Igra Lt.7 Tj (0411) 866872 Makassar

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas nama Nurhikmah Syam, 105710227615 diterima dan sahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan surat keputusan Rektor Muhammadiyah Makassar NOMOR : 0007/SK-Y/60201/091004/2019 M, tanggal 30 September 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 1 syafar 1441 H

30 September 2019 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : D. Agus Setiawan, HR, SE., M.Si  
(Wd I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
  1. Hj. Naidah, SE., M. Si
  2. Dr. H. Andi Rustam, SE., MM, Ak. CPA
  3. Samsul Rizal, SE., MM
  4. A. Nur Achsanuddin UA, SE., M.Si

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ismail Rasulong, SE., MM

NBM. 903 078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
 Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra L1.7 Tlp (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Nurhikmah Syam  
 No Stambuk/NIM : 105710227615  
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
 Judul : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa:

*Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun*

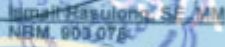
Damikan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

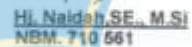
Makassar, 30 September 2019

  
 Yang Membuat Pernyataan,  
 Nurhikmah Syam  
 Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Kelua Program Studi EP

  
 H. Nasution, SE, MM  
 NBM. 003.078

  
 Hj. Naldah, SE, M.Si  
 NBM. 710.561

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “ Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi “

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Syaharuddin dan ibu Mihrawati s.pd tercinta yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian kasih sayang dan doa tulus. Dan saudaraku tercinta Arsyad Fikar yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penuls dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H AbdRahman Rahim, SE., MM.,  
Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM,  
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Hj. Naidah, SE., M. Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi  
Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Hj. Naidah, SE., M. Si, selaku Pembimbing I yang  
senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis,  
sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak A. Nur Achsanuddin UA, SE., M. Si selaku Pembimbing II yang  
telah berkenan membantus selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen  
/Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  
Makassar yang  
tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti  
ah
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamad  
iyah
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi  
Pembangunan Ekonomi Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang  
tidak sedikit bantuannya mendorong dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima Kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bias sayatulissatupersatu  
yang telah memberikan semangat, kesabaran,



Motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya

, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar

*Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Makassar, 8 Agustus 2019

Nurhikmah Syam



## ABSTRAK

**NURHIKMAH SYAM, 2019 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.** Skripsi program studi ekonomi pembangunan fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh pembimbing I Ibu Hj Naidah dan pembimbing II Bapak A. Nur Achsanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan data yang digunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data yang dikumpulkan adalah data Sekunder dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dalam bentuk observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan diperoleh dari BPS Makassar dan BKD Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar karena  $t$ -hitung  $-3,208 < t$ -tabel  $3,182$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,049$  lebih kecil dari tingkat signifikansi  $0,05$  atau  $5\%$ . dan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan karena nilai  $t$ -hitung  $3,966 > t$ -tabel  $3,182$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,29$  lebih kecil dari tingkat signifikansi  $0,05$  atau  $5\%$ .

**KATA KUNCI:** PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN, SEKTOR KESEHATAN, PERTUMBUHAN EKONOMI.

## ABSTRACT

**NURHIKMAH SYAM , 2019 *Effects of Government Expenditures on the Education and Health Sector on Economic Growth.*** Thesis of economics study program for the development of the faculties of economics and business, Muhammadiyah University, Makassar Guided by supervisor I Mrs. Hj Naidah and supervisor II Mr A. Nur Achsanuddin.

This study aims to determine the effect of government spending in the education and health sector on economic growth in the city of Makassar. This type of research used in this study is quantitative research and data used secondary data. Secondary data is data collected indirectly from the source. The data collected is secondary data and uses data collection techniques in the form of observation and documentation. The data used was obtained from Makassar BPS and Makassar BKD.

Based on the results of research, government spending in the education sector has a negative and significant effect on economic growth in the city of Makassar because  $t\text{-count } -3,208 < t\text{-table } 3,182$  with a significant level of 0.049 less than a significant level of 0.05 or 5%, and government spending in the health sector on economic growth has a positive and significant effect because the value of  $t\text{-count } 3,966 > t\text{-table } 3,182$  with a significant level of 0.29 smaller than the significant level of 0.05 or 5%.

KEY WORDS: GOVERNMENT SPENDING, EDUCATION SECTOR, HEALTH SECTOR, ECONOMIC GROWTH.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LatarBelakang.....	7
B. RumusanMasalah.....	7
C. TujuanPenelitian.....	7
D. ManfaatPenelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. PertumbuhanEkonomi.....	8
B. PengeluaranPemerintah .....	12
C. Teori – TeoriPengeluaranPemerintah .....	14
D. Pendidikan.....	16
E. Kesehatan.....	19

F. Tinjauan Empiris .....	22
G. Kerangka Konsep .....	26
H. Hipotesis .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
C. Definisi Operasional.....	28
D. Populasi dan Sampel.....	29
E. Pengumpulan Data .....	30
F. Teknik Analisis.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	34
B. Penyajian Data .....	47
C. Hasil Pengolahan Data .....	54
D. Analisis dan Interpretasi .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>63</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Laju Pertumbuhan Domestik Regional Bruto Kota Makassar atas dasar harga Konstant 2010 tahun 2013 - 2017	5
Tabel 1.2	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan sektor Kesehatan	6
Tabel 2.1	Tinjauan Empiris	22
Tabel 4.1	PDRB Kota Makassar atas Dasar Harga Konstant 2010 tahun 2012 - 2017	48
Tabel 4.2	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstant 2012 – 2017 menurut Lapangan Usaha (Persen)	49
Tabel 4.3	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	52
Tabel 4.4	Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan	53
Tabel 4.5	Analisis Regresi Berganda	54
Tabel 4.6	Output Koefisien Determinasi (Uji R)	56
Tabel 4.7	Hasil Uji Simultan (Uji F)	57
Tabel 4.8	Analisis Koefisien Regresi Secara Parsial	58

## DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Fikir Penelitian 26

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPS 39

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKD 45



## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Hasil Penelitian	68
2	Dokumentasi Penelitian	74
3	Surat Keterangan Penelitian	75
4	Daftar Riwayat Hidup	78





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang tengah giat-giatnya menggalakkan pembangunan nasional, menyadari akan pentingnya pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat serta mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain yang merupakan usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan.

Keberhasilan pembangunan ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan faktor-faktor produksi, yang merangsang perkembangan ekonomi dalam skala besar. Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan berdampak pada semakin meningkatnya pendapatan penduduk yang akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melalui keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia bahwa diantaranya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara-negara sedang berkembang. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga dengan

semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat ( *Mirza,2012:1* )

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berjalan secara terus menerus untuk mencapai suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual, pembangunan haruslah dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, serta institusi-institusi nasional.

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terus menghasilkan serangkaian perdebatan di kalangan ahli ekonomi. Beberapa ekonomi berpendapat bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah pada infrastruktur sosial, ekonomi dan fisik mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan output nasional. Demikian pula, pengeluaran untuk infrastruktur seperti jalan, komunikasi, listrik, dll, mengurangi biaya produksi, meningkatkan investasi sektor swasta dan profitabilitas perusahaan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi ( *Monday et al,2014* ).

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar; terlepas dari hal-hal lain, kedua hal yang penting. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga; keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Pada saat yang sama pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan sebuah

negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Oleh karena itu, kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi produksi agregat. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi.

Meskipun telah mencapai kemajuan-kemajuan yang mengagumkan itu, namun negara-negara dunia ketiga masih terus menghadapi berbagai tantangan seiring dengan upayanya untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan masyarakatnya. Distribusi kesehatan dan pendidikan di suatu negara sama pentingnya dengan distribusi pendapatan di negara-negara berkembang, usia harapan hidup bagi orang-orang mampu cukup tinggi, sementara bagi orang-miskin jauh lebih rendah.

Sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa, karena manusia adalah faktor produksi yang bersifat aktif mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi, politik dan melaksanakan pembangunan nasional. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan dan merupakan suatu hal yang penting dan untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan. Karena dengan sumber daya manusia mutlak harus dilakukan. Karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dapat

memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan suatu negara khususnya pembangunan bidang ekonomi. Secara umum tingkat pendidikan dan kesehatan dapat mewakili kualitas tenaga kerja dengan pendidikan, seseorang akan bertambah keterampilannya, dan dengan kesehatan seseorang akan lebih kuat dan jernih pemikirannya dalam bekerja (*Notoatmodjo, 2009*)

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting kinerja ekonomi suatu negara. Dalam hal ini, banyak penelitian dan karya penelitian telah difokuskan pada faktor-faktor dan kebijakan yang dapat membuat potensi sumber pertumbuhan yang efektif. Sebuah studi OECD pada faktor-faktor pertumbuhan ekonomi menekankan bahwa kebijakan tepat sasaran merupakan instrumen penting bagi iklim usaha dan investasi publik, yang signifikan berkontribusi pertumbuhan ekonomi. (*Milova, 2011*)

Pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, efek pembangunan pada kedua sektor tersebut tidak dapat berdampak langsung melainkan membutuhkan beberapa periode untuk dapat merasakan dampaknya. Terdapat *time lag* ketika pemerintah mengeluarkan anggaran pembangunan dan belanja negara untuk kedua sektor tersebut dengan dampak kebijakan tersebut, maka dibutuhkan suatu penelitian yang menggunakan runtun waktu akan membantu melihat pengaruh pengeluaran pemerintah pada kedua sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi (*Bastias, 2010*)

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterkan masyarakatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memacu kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Bastias 2010)

**Tabel 1.1**

**Laju Pertumbuhan Domestik Regional Bruto Kota Makassar atas Dasar Harga Konstant 2010 Tahun 2013-2017**

NO	Tahun	Laju Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (%)
1	2013	8.55
2	2014	7.39
3	2015	7.55
4	2016	8.03
5	2017	8.23

Sumber: Badan Pusat Statistik Makassar Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.1 pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kota makassar sebesar 8.55 persen hal ini menunjukkan bahwa kinerja pereronomian selama tahun 2013 meningkat setelah sedikit melambat pada tahun 2014 yakni 7.39 persen dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2015 sebesar 7.55 kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 8.03 persen dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 8.23 persen.

Tabel 1.2

**Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan**

Tahun	Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan	Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan
	Realisasi	Realisasi
2013	885.751.893.017.00	133.082.782.608.00
2014	949.569.268.888.00	165.309.043.948.00
2015	966.671.124.143.00	245.763.906.574.00
2016	932.190.474.368.00	302.736.201.810.00
2017	768.305.039.339.00	402.746.664.545.40

*Sumber Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar Tahun 2019*

Berdasarkan Tabel 1.2 pengeluaran pemerintah sektor pendidikan realisasi dari tahun 2013 – 2017 realisasi untuk sektor pendidikan dari tahun 2013 -2017 tetatpi pada tahun 2017 realisasi untuk sektor pendidikan menurun sebesar 768.305.039.339.00 sedangkan untuk pengeluaran sektor kesehatan realisasinya dari tahun ke tahun meningkat dari tahun 2012-2017 .

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi “

## B. Perumusan Masalah

1. Apakah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar 2012 -2017 ?
2. Apakah pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar 2012 -2017 ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar
2. Untuk Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan serta menyelaraskan apa yang di dapat selama kuliah dengan yang terjadi
2. sebagai referensi dan pembandingan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dengan memasukkan variabel-variabel lain yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
3. Digunakan sebagai salah satu sumber informasi dan bahan pertimbangan pemerintah kota makassar maupun instansi yang terkait dalam pengambilan kebijakan

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu “proses” bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu prekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu prekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan sendiri.

Negara kaya maupun miskin yang menganut sistem kapitalis, sosial mapun campuran, semuanya sangat mendambakan pertumbuhan ekonomi. Berhasil tidaknya program program pembangunan di negara-negara berkembang sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan output dan pendapatan nasional. Menurut *Sadono Sukirno (2013:9)*, pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah .

Sejak lama ahli-ahli ekonomi telah menganalisis faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kepada pertumbuhan ekonomi yang berlaku di berbagai negara dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan suatu negara adalah : kekayaan sumber daya alam dan tanahnya, jumlah



dan mutu tenaga kerja, barang-barang modal yang tersedia, tingkat teknologi yang digunakan dan sistem sosial dan sikap masyarakat.

Beberapa teori yang menerangkan mengenai hubungan diantara berbagai faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Pandangan-pandangan teori tersebut antara lain:

### **1. Teori Pertumbuhan Klasik**

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor. Ahli-ahli ekonomi klasik terutama, menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh penambahan penduduk pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ia berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung pada pemulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka pengusaha akan mendapat keuntungan yang besar. Ini akan menimbulkan investasi baru, dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti ini tidak akan terus menerus berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat menurun kembali. Ekonomi akan mencapai

tingkat kemakmuran yang sangat rendah. Apabila keadaan ini dicapai, ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkembang (*stationary state*). Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (*subsistence*). Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut.

Teori pertumbuhan ekonomi klasik melihat bahwa apabila terdapat kekurangan produk, produksi marginal adalah lebih tinggi daripada pendapatan perkapita. Maka penambahan penduduk akan menaikkan pendapatan perkapita. Akan tetapi apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

Pertumbuhan yang terus bertambah akan menyebabkan pada suatu jumlah penduduk yang tertentu produksi marginal telah sama dengan pendapatan perkapita. Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimum.

## **2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar**

Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua ekonom sesudah Keynes yaitu Evsey Domar dan Sir Roy F. Harrod. Teori Harrod-Domar ini mempunyai asumsi dimana perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*), barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh dan perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan

dan besarnya tabungan proporsional dengan besarnya pendapatan nasional serta kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to save =MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (*Capital Output Ratio atau COR*) dan rasio pertambahan modal-output (*Incremental Capital-Output Ratio ICOR*)

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Hubungan tersebut telah kita kenal dengan istilah rasio modal-output (COR). Dalam teori ini disebutkan bahwa, jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya.

### 3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan

Menurut teori ini garis besar proses pertumbuhan mirip dengan teori Harrod-Domar, dimana asumsi yang melandasi model ini dimana tenaga kerja (atau penduduk) tumbuh dengan laju tertentu, misalnya  $P$  pertahun, adanya fungsi produksi  $Q = f(K,L)$  yang berlaku bagi setiap periode dan adanya kecenderungan menabung (*propensity to saving*) oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi ( $s$ ) tertentu dari output ( $Q$ ) juga tabungan masyarakat  $S = sQ$ ; bila  $Q$  naik  $S$  juga naik, sebaliknya serta semua tabungan masyarakat di investasikan  $S = I = \Delta K$ .

Sesuai dengan anggapan mengenai kecenderungan menabung, maka dari output disisakan sejumlah proporsi untuk ditabung dan kemudian di investasikan. Dengan begitu, maka terjadi penambahan stok

kapital. Yang kemudian pembangunan ekonomi dititikberatkan pada teori pertumbuhan ekonomi klasik dimana penduduk merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan dimana penduduk yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sumber produktivitas dari suatu negara dan merupakan tempat investasi yang baik dalam membangun pertumbuhan ekonomi

## **B. pengeluaran pemerintah**

Di Indonesia sendiri pengeluaran pemerintah dapat digolongkan ke dalam beberapa bentuk pengeluaran pembiayaan, diantaranya ada pengeluaran rutin dengan pengeluaran pembangunan. Berikut ini akan diterangkan pengertian dari dua pengeluaran pemerintah.

### **1. pengeluaran Rutin**

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi Daerah dan subsidi harga barang), Angsuran dan bunga utang pemerintah serta jumlah pengeluaran yang lainnya. Anggaran belanja Rutin memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain di upayakan melalui pinjaman alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa kebutuhan departemen /departemen dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap.

## 2. pengeluaran pembangunan

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Pengeluaran pembangunan ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan yang telah direncanakan

Ada tiga pos utama pada sisi pengeluaran dimana pertama pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa, kedua pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai serta pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan transfer.

Pemerintah mampu mempengaruhi tingkat pendapatan keseimbangan menurut dua cara terpisah. Pertama, pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Kedua, pajak dan transfer mempengaruhi hubungan antara output dan pendapatan, dan pendapat *disposable* (pendapatan bersih yang siap untuk dikonsumsi dan ditabung) yang didapat oleh sektor swasta.

Pembayaran transfer adalah pembayaran pemerintah kepada individu yang tidak dipakai untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai imbalannya pengeluaran pemerintah berupa pembiayaan subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat. Perubahan dari pengeluaran pemerintah dan pajak akan mempengaruhi tingkat pendapatan. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa kebijakan fiskal dapat keadaan resesi, pajak harus dikurangi atau pengeluaran di tingkatkan untuk menaikkan output. jika sedang berada dalam masa

makmur (booming) pajak seharusnya dinaikkan atau pengeluaran pemerintah dikurangi.

### C. Teori - Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang terutama bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang mantap dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Jika melihat dari perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, terlihat bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir di segala bidang ekonomi. Semakin meningkatnya peranan pemerintah dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dan proporsinya terhadap penghasilan nasional.

W.W Rostow dan Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio investasi pemerintah terhadap total investasi, atau dengan perkataan lain rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional adalah relatif besar. Hal ini disebabkan karena pada tahap awal ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi agar tetap dapat lepas landas. Bersama dengan itu porsi pihak swasta juga menjadi meningkat. Peranan pemerintah masih tetap besar disebabkan oleh pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri. Banyak terjadi kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan yang menuntut pemerintah untuk turun tangan mengatasinya.

Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi harus juga memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau yang terkena kebijakan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus juga diperhitungkan siapa yang akan terperkerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan pihak swasta.

Menurut Mankiv dalam Ardiyanto (2012) menyebutkan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Kenaikan pengeluaran yang direncanakan akan menyebabkan permintaan agregat. Permintaan agregat akan mendorong produksi barang dan jasa yang akan menyebabkan pendapatan juga akan meningkat.

Pengeluaran pemerintah menurut (Sitaniapessy 2013) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka

menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu alat pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah tentu saja tidak hanya melakukan pengeluaran, tetapi juga memperoleh penerimaan dan pengeluaran pemerintah dimasukkan dalam suatu konsep terpadu mengenai pendapatan dan belanja negara. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk investasi secara langsung maupun tidak langsung.

#### **D. Pendidikan**

##### **1. Pengertian Pendidikan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut (*Juhn Dewey 2009*) pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman, hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda, mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk



melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok dimana ia hidup.

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable development), sektor pendidikan memainkan peranan yang sangat strategis khususnya dalam mendorong akumulasi modal yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan, aktivitas pembangunan dapat tercapai sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa mendatang akan lebih baik (Ramdhan, Setyadi, & Wijaya 2017).

Perbaikan pendidikan diharapkan dapat memberi peluang pertumbuhan yang lebih tinggi di masa depan sebab dengan perbaikan pendidikan maka para pekerja memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengoperasikan dan mengeksplotasi sumber daya ekonomi modern dan memanipulasi modal fisik. Perbaikan tersebut terutama harus diprioritaskan pada pendidikan dasar.

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Indeks pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini

diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolah ( *Ilham, 2009* )

## **2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pengeluaran pemerintah digunakan sebagai bentuk investasi pemerintah dalam memperbaiki perekonomian negara. Dalam meningkatkan kualitas SDM pemerintah perlu memperhatikan pengeluaran di sektor pendidikan, mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat konstitusi bahwa alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja negara. Dengan manusia sebagai *human capital*, peningkatan kemampuan masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan pembangunan suatu negara.

Teori *human capital* menyatakan bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat berproduktivitas tinggi. Investasi pendidikan mutlak dibutuhkan maka dari itu pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Tingginya pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan mampu meningkatkan sarana dari sistem pendidikan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat. Kemampuan masyarakat yang semakin baik akan berpengaruh terhadap kinerjanya dalam

mendorong kegiatan perekonomian dan mampu meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara.

## **E. Kesehatan**

### **1. Pengertian Kesehatan**

Dalam undang-undang No 36 tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk produktif secara sosial dan ekonomi.

Beberapa ekonom beranggapan bahwa kesehatan merupakan fenomena ekonomi yang dapat dinilai dari stok maupun juga dinilai sebagai investasi sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai suatu faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari berbagai tujuan yang ingin diperoleh oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Oleh sebab itu, kesehatan dianggap sebagai modal yang dimiliki tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu perorangan maupun untuk masyarakat luas.

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Wahid,2012)

Kesehatan merupakan salah satu variabel kesejahteraan rakyat yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat sehubungan dengan kualitas kehidupannya. Keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa karena dengan penduduk yang sehat, pembangunan diharapkan dapat berjalan dengan lancar.

Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus di ikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan (*Ilham,2009*)

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan (*Notoatmodjo,2003*)

Usia harapan hidup pada suatu umur X adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur X, pada satu tahun tertentu,dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Untuk indikator kesehatan, variabel yang digunakan adalahb usia harapan hidup penduduk (*ilham,2009*)

Angka Harapan Hidup (AHH) dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. Angka Harapan Hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam perhitungan Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP).

## **2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pengaruh pengeluaran digunakan sebagai bentuk investasi pemerintah dalam memperbaiki perekonomian negara. Dalam meningkatkan kualitas SDM, pemerintah perlu memperhatikan pengeluaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pengeluaran di sektor kesehatan mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi komitmen pemerintah.

Dalam UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi setiap negara. Terkait

dengan teori human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pertumbuhan ekonomi.

#### F. Tinjauan Empiris

Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berikut ini peneliti sajikan hasil penelitian terdahulu atau yang relevan seperti dapat dilihat pada uraian berikut :

NO	Nama Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Bilal Al Wahid (2012)	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Pertumbuhan Ekonomi	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data sekunder	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB, dan belanja tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM baik secara langsung

				<p>maupun pengaruh total. Kedua, belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB, dan belanja tersebut berpengaruh negatif signifikan terhadap PDRB, dan belanja tersebut berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM baik secara langsung maupun pengaruh total. Ketiga, Belanja pemerintah lainnya dalam hal ini belanja pegawai rutin berpengaruh positif terhadap PDRB dan belanja tersebut berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM baik secara langsung maupun pengaruh total</p>
2	Muhammad Ilham Akbar (2016)	Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang	Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif	Hasil penelitian ini adalah variabel pengeluaran pemerintah bidang

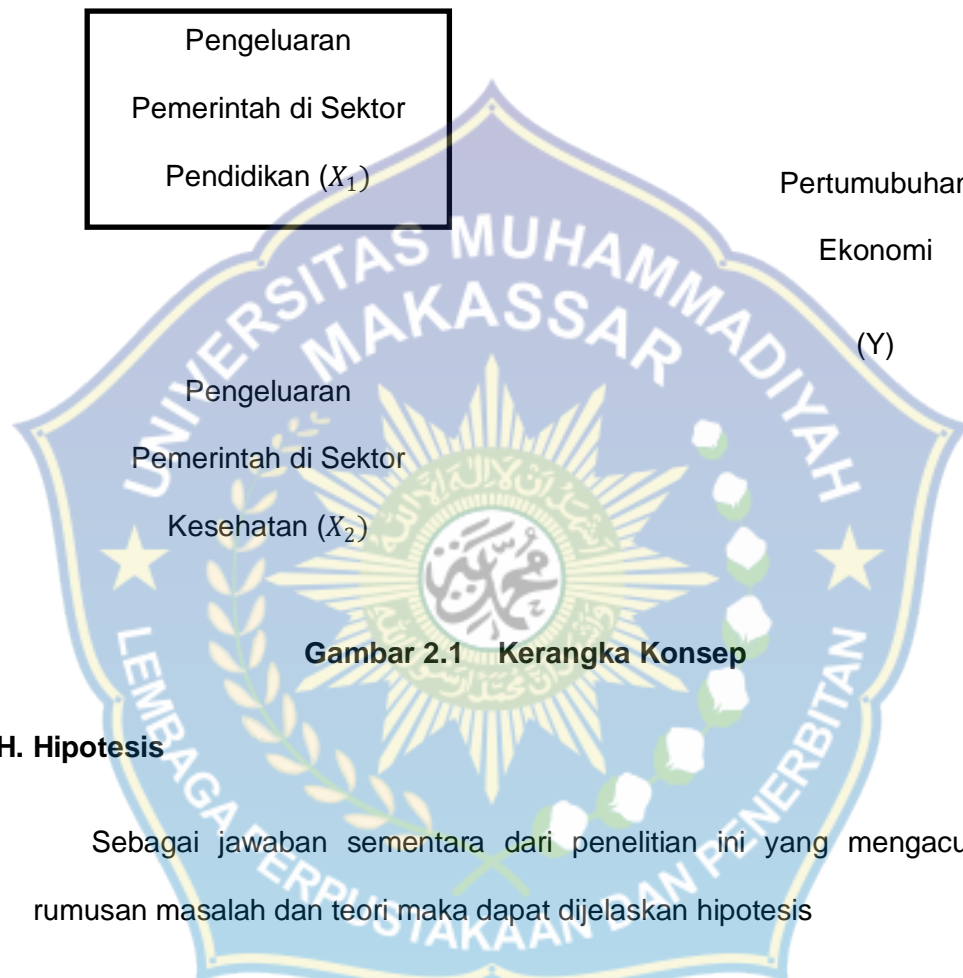
		pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan bantuan sosial terhadap indeks pembangunan manusia	dan data sekunder	pendidikan berpengaruh positif yang signifikan pada indeks pembangunan manusia sementara pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, infrastruktur dan bantuan sosial tidak berpengaruh pada provinsi indeks pembangunan manusia pada periode waktu tertentu
3	Antonius Y. Luntugan (2018)	Pengaruh Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap ipm di kabupaten Halmahera Utara	Penelitian ini menggunakan data sekunder dan model analisis ini menggunakan model analisis regresi linear berganda	Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengeluaran pada bidang pendidikan memiliki tanda positif namun kurang berpengaruh secara signifikan terhadap ipm. Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan bertanda positif dan berpengaruh secara signifikan.
4	Vecky Masinambow (2015)	Pengaruh pengeluaran pemerintah di sector pendidikan	Pendekatan kuantitatif dan menggunakan data	Hasil penelitian pengeluaran pemerintah di sector pendidikan memiliki pengaruh terhadap



		dan kesehatan terhadap PDRB	sekunder indonesia tahun 2002-2013	ipm sedangkan di sector kesehatan tidak memiliki pengaruh. Berdasar pengaruh pengeluaran pemerintah di sector pendidikan pertumbuhan ekonomi bersifat positif sedangkan di sector kesehatan bersifat negatif.
5.	Mardiyand yudha pratama (2016)	Pengaruh pengeluaran pemerintah sector pendidikan dan sector kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data sekunder	Hasil penelitian adalah bahwa variabel pengeluaran pemerintah sector pendidikan berpengaruh negative dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dan variabel pengeluaran pemerintah di sector kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

## G. Kerangka Konsep

Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pikir dari penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut ini:



## H. Hipotesis

Sebagai jawaban sementara dari penelitian ini yang mengacu pada rumusan masalah dan teori maka dapat dijelaskan hipotesis

- a. Diduga bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota makassar
- b. Diduga bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota makassar

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini data kuantitatif adalah data jenis yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun jenis data yang dapat diperoleh berdasarkan sumbernya adalah sebagai berikut :

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi maupun wawancara oleh narasumber/informan pada objek/lokasi penelitian
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini diadakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yakni, pada Badan Pusat Statistik Kota Makassar dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar, Dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Juni 2019.

#### C. Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Defenisi Operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan variabel yang ingin diteliti. Untuk itu defenisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (Y). Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan perekonomian suatu kota dalam satu tahun tertentu yang dihitung berdasarkan PDRB. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah

#### 2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan ( $X_1$ )

Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan merupakan besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan ditunjukkan dengan jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan untuk sektor pendidikan. Pengeluaran rutin dibagi menjadi dua yaitu pengeluaran rutin secara langsung dan pengeluaran tidak langsung. Pengeluaran rutin secara langsung yaitu segala pengeluaran yang secara langsung mempengaruhi atau menunjang penyelenggaraan pendidikan sedangkan pengeluaran rutin secara tidak langsung yaitu segala yang tidak langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan tetapi mungkin terjadinya proses pendidikan.

## 2. Pengeluaran Pemerintah di sektor kesehatan ( $X_2$ )

Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan merupakan besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan. Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan ditunjukkan dengan jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan untuk sektor kesehatan. Pengeluaran rutin dibagi menjadi dua yaitu pengeluaran rutin secara langsung dan pengeluaran tidak langsung. Pengeluaran rutin secara langsung yaitu segala pengeluaran yang secara langsung mempengaruhi atau menunjang fasilitas kesehatan sedangkan pengeluaran rutin secara tidak langsung yaitu segala yang tidak langsung menunjang fasilitas kesehatan.

### D. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek dan subyek yang memiliki kualitas dan karkateristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang nantinya peneliti pilih sebagai obyek penelitian di kota makassar mengenai pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan yang diperoleh di badan keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang diperoleh di badan pusat statistik.

#### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2012-2017

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Teknik Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terkait variabel-variabel yang akan di teliti
2. Teknik Dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa literatur-literatur, buku-buku dan artikel –artikel yang berhubungan objek yang akan dibahas

#### **F. Teknik Analisis**

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di makassar maka akan dianalisis dengan menggunakan modal uji statistik linear berganda. Uji statistik linear berganda digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan linear antara dua atau lebih variabel melalui metode regresi.

Regresi linear berganda yaitu hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel bebas atau independen ( $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ ) dengan variabel terikat atau dependen (Y). Uji analisis ini digunakan untuk menganalisa hubungan antara variabel-variabel bebas dalam hal ini penegeluaran pemerintah di sektor pendidikan ( $X_1$ ), dan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan ( $X_2$ ), dengan variabel terikatnya dalam hal ini pertumbuhan ekonomi (Y).

Semua variabel tersebut dapat dirangkum dalam suatu hubungan fungsional.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana

Y = Pertumbuhan Ekonomi

$X_1$  = Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan

$X_2$  = Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan

a = Konstanta

$b_1, b_2, b_3$  = Koefisien Regresi

e = Error Term

### 1. Uji Statistik F

Uji signifikan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistik bahwa seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satuan variabel independen akan menyebabkan peningkatan  $R^2$ , tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (memiliki nilai t yang signifikan).

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan level of significance 5 persen, kriteria pengujianya apabila nilai  $F_{-statistik} < F_{-tabel}$  maka hipotesis ditolak yang artinya seluruh variabel independen yang digunakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

variabel independen yang digunakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila  $F_{-statistik} > F_{-tabel}$  maka hipotesis diterima yang berarti seluruh variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan taraf signifikan tertentu.

## 2. Uji Statistik t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara nyata.

Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dilihat pada hipotesis berikut:  $H_0: \beta_1 = 0$  tidak berpengaruh,  $H_1: \beta_1 > 0$  berpengaruh positif,  $H_1: \beta_1 < 0$  berpengaruh negatif. Dimana  $\beta_1$  adalah koefisien variabel independen ke-1 yaitu nilai parameter hipotesis. Biasanya nilai  $\beta$  dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh variabel  $X_1$  terhadap Y. Bila  $t_{statistik} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima (signifikan) dan jika  $t_{statistik} < t_{tabel}$   $H_0$  ditolak (tidak signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%.

## 3. Analisis Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan ( $X_1$ ), pengeluaran



pemerintah di sektor kesehatan ( $X_2$ ), dan indeks pembangunan manusia ( $X_3$ ) terhadap variabel dependen dalam hal ini pertumbuhan ekonomi ( $Y$ ) maka digunakan analisis koefisien determinisasi ( $R^2$ ).

Koefisien Determinisasi ( $R^2$ ) yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai  $R^2$  yang mendekati satu berarti variabel – variabel undependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memperediksi variabel-variavel dependen

Akan tetapi ada katanya dalam penggunaan koefisien determinisasi terjadi terhadap satu variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen akan menyebabkan peningkatan  $R^2$ , tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen ( memiliki nilai t yang signifikan )

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar merupakan dataran rendah dengan ketinggian bervariasi antara 1-25 meter di atas permukaan laut. Kota Makassar pada tanggal 1 September 1971 berubah namanya menjadi kota ujung pandang setelah diadakan perluasan kota dari 21 km<sup>2</sup> menjadi 175,77 km<sup>2</sup>. Namun kemudian, pada tanggal 13 Oktober 1999 berubah kembali namanya menjadi Kota Makassar. Kota Makassar merupakan kota internasional serta terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibu kota Negara Indonesia Timur Provinsi Sulawesi. Secara administratif Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan.

Secara Geografis Kota Metropolitan Makassar terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan pada koordinat 119°18'27,97" 119°32'31,03" Bujur Timur dan 5°00'30,18" - 5°14'6,49" Lintang Selatan dengan luas wilayah 175.77 km<sup>2</sup> dengan batas-batas berikut:

Batas Utara : Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Batas Selatan : Kabupaten Gowa

Batas Timur : Kabupaten Maros

Batas Barat : Selat Makassar

Secara administrasi Kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan dan 142 Kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT

Ketinggian Kota Makassar bervariasi antara 0-25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20°C sampai dengan 32°C. Kota Makassar diapit dua buah sungai yaitu: Sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota.

## 2. Gambaran Umum Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik.

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :

- a. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
- b. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat

dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.

- c. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
- d. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan Kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder
- b. Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional
- c. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik
- d. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik indonesia.

Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

a. Tugas

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

1. Pengkajian ,penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang statistik
2. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional
3. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar
4. Penetapan sistem statistik nasional
5. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik dan
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga

c. Kewenangan

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya
4. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional
5. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. i. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik

- ii. Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

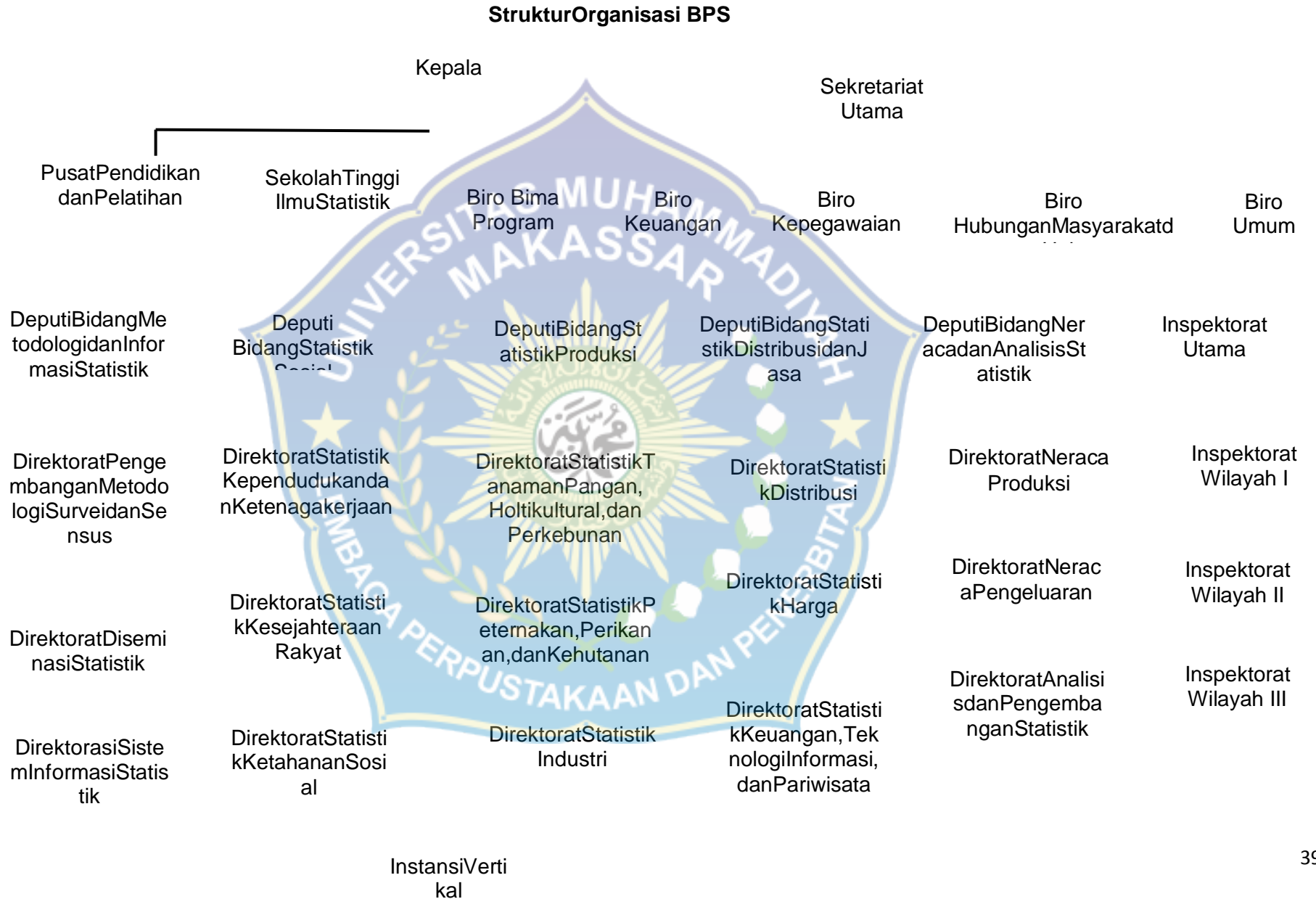
#### Visi BPS

*Pelopor data statistik terpercaya untuk semua*

#### Misi BPS

1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien
2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia
3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik
4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak
5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

Gambar 4.1 : STRUKTUR ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2019

## Deskripsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Susunan organisasi BPS terdiri dari:

1. Kepala
2. Sekretariat Umum
3. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik
4. Deputi Bidang Statistik Sosial
5. Deputi Bidang Statistik Produksi
6. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
7. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik
8. Inspektorat Utama
9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan
10. Instansi Vertikal

BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas memimpin BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPS: menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung jawabnya. Serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain. Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris utama ,5 (lima) Deputi dan Inspektorat Utama.

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan peencanaan, pembinaan,pengendalian,administrasi,dan sumber daya di



lingkungan BPS. Sekretariat Utama terdiri dari beberapa Biro, Setiap Biro terdiri dari beberapa Bagian dan setiap Bagian terdiri dari beberapa Subbagian. Sekretariat Utama terdiri dari Biro Bina Program, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, dan Biro Umum.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi Statistik terdiri dari Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Direktorat Diseminasi Statistik, dan Direktorat Sistem Informasi Statistik.

Deputi bidang statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial. Deputi Bidang Statistik Sosial terdiri dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Deputi Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi. Deputi Bidang Statistik Produksi terdiri dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Direktorat Peternakan, Perikanan dan Kehutanan dan Direktorat Statistik Industri.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi dan jasa. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa terdiri dari

Direktorat Statistik Harga, Direktorat Statistik Distribusi, dan Direktorat Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik terdiri dari Direktorat Neraca Produksi, Direktorat Neraca Pengeluaran, Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik.

Inspektorat utama yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS.

Pusat pendidikan dan pelatihan (Pusdiklat) yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta teknis dan fungsional.

Instansi Vertikal BPS terdiri dari BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS

BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi

Disamping itu terdapat Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) yang pembentukannya berlandaskan pada keputusan Presiden Nomor 163 tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu statistik sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik yang berkedudukan di Jakarta. Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Statistik didasarkan pada Keputusan Kepala BPS Nomor 101 tahun 1998 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dipimpin oleh seorang Ketua..

### **3. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar**

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar adalah rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BPKA Kota Makassar yang disusun sesuai tugas,wewenang dan fungsi BPKA Kota Makassar serta berpedoman kepada RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019 dan merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Walikota Makassar periode 2014-2019.

Fungsi Renstra BPKA dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Makassar merupakan dokumen yang menjabarkan RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019 yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Renstra BPKA berfungsi sebagai dokumen rujukan yang menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan Kota Makassar Tahun 2014-2019. Renstra BPKA juga berfungsi sebagai dokumen rujukan dalam penyusunan rencana kerja (renja) BPKA setiap tahun,yang dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019 dapat dicapai secara bertahap setiap tahun.

Proses penyusunan Restra BPKA diawali dengan Pembentukan Tim Penyusun Restra BPKA, selanjutnya dilakukan orientasi mengenai Restra BPKA yang mencakup peraturan perundang-undangan, panduan atau pedoman teknis penyusunan Restra SKPD dan penyusunan anggaran. Dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Restra BPKA adalah RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019 yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh BPKA selama lima tahun.



Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar Tahun 2019

Struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
  - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
  - c. Kepala Sub Bagian Perlengkapan
3. Kepala Bidang Anggaran
  - a. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan
  - b. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran
4. Kepala Bidang Perbendaharaan
  - a. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
  - b. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Gaji
5. Kepala Bidang Akuntansi
  - a. Kepala Sub Bidang Pembukuan
  - b. Kepala Sub Bidang Pelaporan
6. Kepala Bidang Aset
  - a. Kepala Sub Bidang Mutasi dan Inventarisasi Aset
  - b. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Aset

Adapun Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Periode 2014-2019 adalah

*“Mewujudkan APBD yang berkualitas menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2019”*

Untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset memiliki Misi:

1. Menciptakan Kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan dan tepat waktu
2. Meningkatkan Akurasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
3. Meningkatkan sistem Pengelolaan Keuangan daerah menuju opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4. Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah yang profesional dan modern
5. Meningkatkan sarana, prasarana dan SDM dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

#### **B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)**

##### 1. Data Penelitian

###### a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertumbuhan pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. . Data pertumbuhan ekonomi tahun 2012-2017

**Tabel 4.1**  
**PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun**  
**2012-2017**

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2012	70,851,035,0	9,64
2013	76,907,410,8	8,55
2014	82,592,818,4	7,39
2015	88,750.158,4	7,55
2016	95,836,948,8	8,03
2017	103,826,155,90	8,20

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2019*

Berdasarkan Tabel dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB di kota makassar, dari data tersebut terlihat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni mencapai 9,64 persen dan pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yakni 8,55 persen , dan pada tahun 2014 sampai 2015 pertumbuhan ekonomi tetap menurun menjadi 7,39 persen dan 7,55 persen , pertumbuhan ekonomi kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar 8,03 persen, sampai tahun 2017 meningkat kembali meningkat yakni 8,20.



Tabel 4.2

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2012-2017**  
**Menurut Lapangan Usaha (Persen)**

Kategori	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.46	7.08	7.83	2.68	3.64	1.58
B	Pertambangan dan Pengalihan	24.69	15.16	-13.97	-14.68	-13.08	-4.37
C	Industri Pengolahan	8.56	8.3	7.78	6.15	8.38	6.33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18.02	5.38	19.21	-4.71	10.59	6.42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	5.03	7.84	1.4	0.44	2.11	6.88
F	Konstruksi	11.66	10.44	10.35	8.52	7.85	8.42
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.06	6.36	7.58	7.05	9.26	10.08
H	Transportasi dan Pergudangan	8.07	7.07	6.55	4.13	5.59	8.82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.95	7.91	6.65	6.18	8.46	8.71
J	Informasi dan Komunikasi	17.51	13.08	5.69	9.14	9.44	9.81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	16.01	8.56	5.44	7.37	12.97	5.82
L	Real Estate	9.08	9.14	9.38	7.98	2.11	-2.3
M,N	Jasa Perusahaan	7.97	8.16	6.7	5.09	6.04	1.36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0.34	1.35	1.55	11.09	-5.53	5.75
P	Jasa Pendidikan	8.38	9.03	5.83	7.97	7.47	9.34

Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.27	7.58	9.22	7.85	9.6	1.88
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8.49	7.3	7.43	7.06	9.36	9.42
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>9.64</b>	<b>8.55</b>	<b>7.39</b>	<b>7.55</b>	<b>8.03</b>	<b>8.2</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2019



Berdasarkan tabel 4.2 Perekonomian Kota Makassar pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir. Laju pertumbuhan PDRB Kota Makassar tahun 2015 mencapai 7,55 persen, sedangkan tahun 2016 sebesar 8,03 persen kemudian tahun 2017 pertumbuhan menjadi 8,20 persen. Kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi tahun 2017 dicapai oleh kategori perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,08 %, diikuti informasi dan komunikasi sebesar 9,81 persen. Sementara kategori lapangan usaha yang lain pada tahun 2017 mencatat pertumbuhan di bawah 10 persen dan semuanya positif kecuali sektor pertambangan dan penggalian.

Adapun pertumbuhan lapangan usaha lainnya yang di bawah 10 persen, diantaranya lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,58 persen, lapangan usaha industri pengolahan sebesar 6,33 persen, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 6,42 persen, lapangan usaha pengadaan air, pengolahan sampah limbah dan daur ulang 6,88 persen, konstruksi 8,42 persen, lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 8,82 persen, lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum 8,71, lapangan usaha informasi dan komunikasi 9,81 persen, jasa keuangan dan asuransi 5,82 persen, jasa perusahaan 1,36 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 5,75 persen, jasa pendidikan sebesar 9,34 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 1,88 persen, dan jasa lainnya sebesar 9,42

persen. Sementara yang minus pertumbuhannya adalah lapangan usaha pertmbangan dan penggalian sebesar -4,37 persen dan real estate sebesar -2,30.

b. Pengeluaran Pemerintah Sektor pendidikan

**Tabel 4.3**

**Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan**

Tahun	Anggaran	Pengeluaran (Realisasi)
2012	855.253.364.000.00	780.697.349.899.00
2013	946.441.846.200.00	885.751.893.017.00
2014	1.074.023.475.000.00	949.569.268.888.00
2015	1.139.866.056.206.00	966.671.124.143.00
2016	1.159.877.407.000.00	932.190.474.368.00
2017	824.683.243.950.00	768.305.039.339.00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar

Berdasarkan tabel 4.3 pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, pada tahun 2012 anggaran sebesar Rp. 855.253.364.000.00 realisasi sebesar Rp. 780.697.349.899.00. tahun 2013 anggaran meningkat sebesar Rp. 946.441.846.200.00 dan realisasi sebesar Rp. 885.751.893.017.00. Tahun 2014 mengalami kembali peningkatan sebesar Rp. 1.074.023.475.000.00 realisasi sebesar Rp. 949.569.268.888.00. terus mengalami peningkatan sampai tahun 2016 anggaran sebesar Rp. 1.159.877.407.000.00. dan realisasi

sebesar Rp. 932.190.474.368.00 tetapi pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 880.415.213.590.00 dan realisasi sebesar Rp.802.664.391.835.09.

c. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

**Tabel 4.4**

**Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Pengeluaran (Realisasi)</b>
2012	108.382.524.000.00	103.325.866.701.00
2013	141.556.695.300.00	133.082.782.608.00
2014	180.020.338.000.00	165.309.043.948.00
2015	281.009.864.000.00	245.763.906.574.00
2016	338.185.336.000.00	302.736.201.810.00
2017	441.510.249.122.00	402.746.664.545.40

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel 4.2 pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tahun 2012 anggaran sebesar Rp. 108.382.524.000.00 realisasi sebesar Rp.103.325.866.701.00. Tahun 2013 anggaran meningkat sebesar Rp. 141.556.695.300.00 realisasi sebesar Rp. 133.082.782.608.00. Tahun 2014 kembali anggaran meningkat sebesar Rp. 180.020.338.000.00 dan realisasi sebesar 165.309.043.948.00. Tahun 2015 terus mengalami peningkatan sampai tahun 2017 Rp. 441.510.249.122.00 realisasi sebesar Rp. 402.746.664.545.40.

### C. Hasil Pengolahan Data

1. Analisis Regresi berganda merupakan alat untuk meramalkan nilai perubahan variabel bebas terhadap variabel terikat. Model variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini, berikut hasil pengolahan data analisis regresi berganda :

Tabel 4.5

#### Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	76.360	27.470		2.780	.069
	Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi	-6.259	1.951	-.606	-3.208	.049
	Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	1.503	.379	.749	3.966	.029

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber :Output SPSS versi 22, data diolah

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 76.360 - 6.259X_1 + 1.503X_2 + e$$

### Keterangan

$Y$  = Pertumbuhan Ekonomi

$X_1$  = Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan

$X_2$  = Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan

Persamaan regresi linear berganda tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 76.360 yang berarti bahwa jika variabel jumlah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan sama dengan nol maka besarnya pertumbuhan ekonomi sebesar 76.360. Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi selain itu, pada nilai coefficient pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan sebesar -6.259 maka hubungannya memiliki hubungan negatif dan signifikan jika terjadi perubahan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan sebesar 1% maka akan mengubah pertumbuhan ekonomi sebesar - 6.259 selain itu untuk variabel pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 3.966 maka hubungannya positif dan signifikan jika terjadi perubahan pengeluaran pemerintah sebesar 1% maka akan mengubah pertumbuhan ekonomi sebesar 3.966 . pada  $\alpha = 5\%$  sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kota makassar.

## 2. Uji Kesesuaian

### a. uji F

tabel 4.7

Hasil uji simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.910	2	.455	12.522	.035 <sup>b</sup>
	Residual	.109	3	.036		
	Total	1.018	5			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Sumber : Output SPSS versi 22, data diolah

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y sebesar  $0,035 < 0,5$  dan nilai F hitung  $12.522 > 9,55$  ( mencari nilai F tabel ditentukan oleh numerator  $(k-1)$   $(3-1=2)$  dan df untuk denominator  $(n-k)$   $(6-3=3)$  dengan melihat F tabel ) sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen (X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel dependent (Y) .

### b. Uji Parsial (Uji – t)

Uji – t digunakan untuk menunjukkan apakah masing –masing variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan secara parsial



berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi (Y). tabel 4.8 menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 4.8

## Analisis Koefisien Regresi Secara Parsial

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	76.360	27.470		2.780	.069
	Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi	-6.259	1.951	-.606	-3.208	.049
	Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	1.503	.379	.749	3.966	.029

a. Dependent Variable: Pertubuhan Ekonomi

Sumber :Output SPSS versi 22, data diolah

- a. Diketahui nilai sig. untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar  $0,049 < 0,05$  dan nilai t hitung  $-3.208 < t$  tabel 3.182 sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y
- b. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar  $0,029 < 0,05$  dan nilai t hitung  $3.966 > t$  tabel 3.182 , sehingga dapat disimpulkan bahwa X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y.

c. Koefisien Determinan (R Square)

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi menunjukkan besarnya variasi yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap Y yang dikuadratkan (R square). Nilai R square pada output SPSS sebagai berikut :

Tabel 4.6

Output Koefisien Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.945 <sup>a</sup>	.893	.822	.19057	.893	12.522	2

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber Output SPSS versi 22, data diolah

Berdasarkan tabel 4.6 besarnya R Square yang diperoleh dari pengolahan data dengan menggunakan SPSS sebesar 0,822 dengan demikian besarnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat sebesar 82,2% sedangkan sisanya sebesar 17,8 % dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## D. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi tahun 2012-2018

### 1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan terhadap Pertumbuhan ekonomi

Hipotesis untuk menguji pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

#### Pernyataan Hipotesis

Ho :  $\beta_i > 0$  : Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Ha :  $\beta_i < 0$  : Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

#### Kriteria pengujian dua pihak

Jika :  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka Ha diterima dan Ho ditolak

$t_{hitung} < t_{tabel}$  maka Ha ditolak dan Ho diterima

Dari Hasil analisis regresi secara parsial pada tabel 4.8 dimana koefisien diperoleh nilai t-hitung untuk variabel (X1) sebesar -3,208 dan nilai t-tabel sebesar 3,182

Oleh karena itu untuk koefisien variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan (X1) sebesar t-hitung  $-3,208 >$  t-tabel 3,182 dengan tingkat signifikan sebesar 0,049 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 atau 5%. Maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak yang berarti terdapat pengaruh antara pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota makassar dan nilai signifikan positif dan t-hitung negatif sehingga pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota makassar.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di kota makassar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Dengan menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa selama tahun 2012-2017 pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota makassar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiyand yudha pratama (2016) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## 2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis untuk menguji pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

### Pernyataan Hipotesis

$H_0 : \beta_i > 0$  : Pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

$H_a : \beta_i < 0$  : Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

### Kriteria pengujian dua pihak

Jika :  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak

$t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima

Dari Hasil analisis regresi secara parsial pada tabel 4.8 dimana koefisien diperoleh nilai t-hitung untuk variabel (X2) sebesar -2,036 dan nilai t-tabel sebesar 3,182

Oleh karena itu untuk koefisien variabel pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan (X2) sebesar t-hitung 3.966 > t-tabel 3,182 dengan tingkat signifikan sebesar 0,029 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 atau 5%. Maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang

berarti terdapat pengaruh antara pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota makassar dan nilai signifikan positif dan t-hitung positif sehingga pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota makassar.

Dengan menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa selama tahun 2012 - 2017 pengeluaran pemerintah di sektor keehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota makassar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Antonius Y. Luntungan (2018) pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi kota makassar dapat diambil kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil analisis pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota makassar pada tahun 2012-2017 menunjukkan nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel yaitu  $-3,208 < 3,182$  dengan nilai probabilitas  $0,049 < 0,05$  atau 5 % artinya variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota makassar.
2. Berdasarkan hasil analisis pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota makassar pada tahun 2012-2017 menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu  $3,966 > 3,182$  dengan nilai probabilitas  $0,029 < 0,05$  atau 5% artinya variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota makassar.

#### B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah di kemukakan sebelumnya maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan khususnya pemerintah kota makassar agar memperhatikan juga pada variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan sehingga pada periode di masa yang akan datang variabel tersebut bisa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa di jadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan penelitian. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki kekurangan seperti keterbatasan dalam memperoleh data dan periode yang digunakan hanya 6 tahun. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambah variabel lainnya.





## DAFTAR PUSTAKA

- A.Wahid, B. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pemabangunan Manusia (IPM) melalui Pertumbuhan Ekonomi di Makassar Periode 1996-2010. *Skripsi Ilmu Ekonomi*, Universitas Hasanuddin.
- Ardiyanto, D. (2012). Analisa Keterkaitan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya*, Malang.
- Akbar, M. I. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Bantuan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun (2008-2014). *Skripsi Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Angraeni, M. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan Kesehatan dan Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970-2015. *Skripsi Ekonomi*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bastias Dwi, Desi. 2010. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan Kesehatan dan Insfraktruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Periode 1969-2009. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ilham Irawan, 2009. Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Jhingan, M. (1975). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartika. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jeneponto Periode 2005-2014. *Skripsi Ekonomi*, Universitas Hasanuddin.

- Mirza, D. (Tahun 2006-2009). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah . *Jurnal Economics Development Analysis Journal*, Semarang.
- Michael P. Todaro, & Stephen C.Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Milova. (2011). Pengeluaran Publik Berpengaruh Pada Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Bisnis vol 10 No 5*.
- Monday, & Robinso Olulu. (2014). Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Penerbitan Ilmu Sosial Vol 5 No 10*.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pendidikan dan Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sitaniapessy, H. (2013). Pengaruh Pengeuaran Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD *Jurnal Ekonomia, vol 9*.
- Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003
- Undang-Undang No 36 Tahun 2009
- Wahid, A, & Bilal. (2012). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Makassar Periode 1996-2011*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Wahyuni. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Investasi Swasta dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan Periode 2000-2010. *Skripsi Ekonomi*, Universitas Hasanuddin.

L

A

M

P

I

R

A

N



### Data Excel yang diolah Ke SPSS

#### Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan

Tahun	Realisasi Pendidikan	sesudah di log
2012	78069734989900.00	13.89248271
2013	88575189301700.00	13.94731209
2014	94956926888800.00	13.97752665
2015	96667112414300.00	13.98527875
2016	93219047436800.00	13.96950466
2017	76830503933900.00	13.88553368

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Makassar Tahun 2019

#### Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan

Tahun	Realisasi Kesehatan	Sesudah di Log
2012	10332586670100.00	13.01420906
2013	13308278260800.00	13.12412187
2014	16530904394800.00	13.21829661
2015	24576390657400.00	13.3905181
2016	30273620181000.00	13.48106436
2017	40274666454540.00	13.60503195

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Makassar Tahun 2019

#### Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstant (Jutaan Rupiah)	sesudah di log
2012	70,851,035,0	8.850346199
2103	76,907,410,8	8.88596819
2014	82,592,818,4	8.916942286
2015	88,750,158,4	8.948169137
2016	95,836,948,8	8.981532978
2017	103,826,155,90	10.01630677

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makssar Tahun 2019

```

REGRESSION
/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X1 X2
/RESIDUALS DURBIN.

```

## Regression

[DataSet0]

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Pertumbuhan Ekonomi	9.0998	.45133	6
Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi	13.9429	.04371	6
Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	13.3055	.22500	6

Correlations			
	Pertumbuhan Ekonomi	Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi	1.000	-.576	.725
Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi	-.576	1.000	.040
Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	.725	.040	1.000

Sig. (1-tailed)	Pertumbuhan Ekonomi	.	.116	.051
	Pengeluaran			
	Pemerintah di Sektor			
	Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi	.116	.	.470
	Pengeluaran			
	Pemerintah di Sektor			
N	Kesehatan Terhadap	.051	.470	.
	Pertumbuhan Ekonomi			
	Pertumbuhan Ekonomi	6	6	6
	Pengeluaran			
	Pemerintah di Sektor	6	6	6
	Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi			
N	Pengeluaran			
	Pemerintah di Sektor			
	Kesehatan Terhadap	6	6	6
	Pertumbuhan Ekonomi			

#### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi <sup>b</sup>		Enter

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.945 <sup>a</sup>	.893	.822	.19057	.893	12.522	2

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.910	2	.455	12.522	.035 <sup>b</sup>
Residual	.109	3	.036		
Total	1.018	5			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B.	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	76.360	27.470		2.780	.069
Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi	-6.259	1.951	-.606	-3.208	.049
Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	1.503	.379	.749	3.966	.029

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	8.7522	9.9093	9.0998	.42650	6
Residual	-.21593	.16442	.00000	.14761	6
Std. Predicted Value	-.815	1.898	.000	1.000	6
Std. Residual	-1.133	.863	.000	.775	6

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

## Titik persentase distribusi F untuk probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89



## Titik persentase distribusi t (df = 1-40 )

df	Pr	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26		0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27		0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28		0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29		0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30		0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31		0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32		0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33		0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34		0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35		0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36		0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37		0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38		0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39		0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40		0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

## Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian



Keterangan : Pengambilan data di kantor Badan Pusat Statistik



Keterangan : Pengambilan data di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA MAKASSAR**

JL. ABDURRAJMAN BASALAMAHJI MAKASSAR TELP. 0411-442698

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor: 019/BPS/73716/VII/2019

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 19964/S.01/PTSP/2019 tanggal 18 Juli 2019, bersama ini disampaikan bahwa:

Nama : **NURHIKMAH SYAM**  
 Nomor Pokok : 10571 02276 45  
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
 Pekerjaan : Manajer (S)  
 Alamat : Jl. Slt. Alauddin No.259, Makassar

Benar telah melakukan pengumpulan data atau penelitian/kepastakan pada Kantor Badan Pusat Statistik Kota Makassar mulai tanggal 20 Juli 2019, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

**"PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DISEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DIKOTA MAKASSAR"**

Demikian surat keterangan penelitian ini diberika untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 24 Juli 2019

An. Kepala BPS Kota Makassar






120181914210260

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 19964/S.01/PTSP/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **izin Penelitian**

Kepada Yth.  
1. Walikota Makassar  
2. Kepala Badan Pusat Statistik Makassar

d-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UINSAH Makassar Nomor : 2420/05/C.4-VIII/VII/37/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa peneliti dibawah ini:

Nama : **MURHOMAH SYAM**  
Nomor Pokok : **1057102270-15**  
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**  
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S II)**  
Alamat : **Jl. KH. Abdussalam No. 259, Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : **Tgl. 20 Juli s/d 20 September 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada penghapnya kami menyatakan kegiatan dimaksud dengan kelentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Dibagikan di Makassar  
Pada tanggal : 18 Juli 2019

**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
*Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu*

**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
Tempat : Dombina Utama Madya  
Np : 19610513 199002 1 002

Tembusan YB:  
1. Ketua LP3M UINSAH Makassar di Makassar,  
2. Peringkat



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867  
Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 22 Juli 2019

**Kepada**

Nomor : 070 / 2487 -II/BKBP/VII/2019  
Sifat :  
Perihal : Izin Penelitian

Yth. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR

Di -  
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 19964/S.01/PTSP/2019 Tanggal 18 Juli 2019, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **NURHIKMAH SYAM**  
NIM / Jurusan : 10571 02278 15 / Ekonomi Pembangunan  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH  
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar  
Judul : **"PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 22 Juli s/d 20 September 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR  
KEPALA BADAN

**Dr. ANDI SYHRUM, SE, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. : 19660517 200112 1 002

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;

## BIOGRAFI PENULIS



Nurhikmah syam panggilan Hikmah lahir di Balombessi pada tanggal 29 Oktober 1997 dari pasangan suami istri Bapak Syaharuddin dan Ibu Mihrawati. Peneliti Sekarang bertempat tinggal di Jalan Jipang Raya Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 64 Balombessi lulus tahun 2009, SMP Negeri 5 Bulukumpa lulus tahun 2012, SMA Negeri 2 Bulukumba lulus tahun 2015, dan mulai tahun 2015 mengikuti program S1 Ekonomi Pembangunan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan ini penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.